

Studi komparatif ketimpangan antar pulau di Indonesia

Ufit Panggarti¹, Zumaeroh², Sodik Dwi Purnomo^{3✉}, Diah Retnowati⁴, Bagus Adhitya⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijayakusuma, Purwokerto.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, mengidentifikasi indeks williamson berdasarkan kepulauan di Indonesia, menganalisis hubungan ketimpangan pembangunan terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan investasi berdasarkan kepulauan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di Indonesia tahun 2016-2020. Metode penelitian ini menggunakan analisis indeks williamson dan analisis korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua masuk kategori dengan ketimpangan tinggi. Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan masuk kategori ketimpangan sangat tinggi. Pulau Sulawesi masuk kategori ketimpangan mendekati merata. Pulau Maluku masuk dalam kategori sangat merata. Ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan investasi. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menciptakan pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia.

Kata kunci: Ketimpangan; indeks williamson; korelasi paerson

Comparative Study of Inter-Island Inequality in Indonesia

Abstract

The purpose of this research is, Identify the Williamson index based on islands in Indonesia, analyze the relationship between inequality and employment opportunity, poverty, Human Development Index, and investment based on islands in Indonesia. This type of research is descriptive and qualitative. The research was conducted in Indonesia at 2016-2020. This research method uses williamson index analysis and paerson correlation analysis. The results showed that the Sumatra island, Nusa Tenggara island, and Papua island were categorized with high inequality. Java Island and Kalimantan Island are categorized as very high inequality. Sulawesi Island is categorized as near-equal inequality. The Maluku island is in the very even category. Inequality based on islands in Indonesia has a high very relationship and significant on employment opportunities, poverty, human development index, and investment. The implication of this research is that the central government and local governments create equitable infrastructure development in Indonesia.

Key words: *Inequality; williamson index; paerson correlation*

Copyright © 2022 Ufit Panggarti, Zumaeroh, Sodik Dwi Purnomo, Diah Retnowati, Bagus Adhitya

✉ Corresponding Author

Email Address: sodikdwipurnomo@yahoo.com

DOI: 10.29264/jfor.v24i2.10988

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pertumbuhan ekonomi yang bermacam-macam berbeda-beda di setiap wilayahnya. Setiap wilayah memiliki perbedaan potensi diantaranya yaitu baik dari sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang dimiliki, dan memiliki fasilitas yang lengkap juga tenaga kerja yang terampil serta letak geografis di masing-masing daerah tertentu akan menimbulkan dampak dari perbedaan pada pembangunan ekonomi di wilayah tersebut (Umiyati, 2014). Wilayah yang mayoritas berada dipusat perekonomian rill dan pasar berlokasi di pusat atau berdekatan dengan ibu kota, maka pembangunan perekonominya relatif lebih baik. Begitu juga sebaliknya, wilayah yang mayoritas berada dipusat perekonomian rill dan pasar berlokasi di pusat atau berdekatan dengan ibu kota, maka akan mengalami pembangunan ekonomi cenderung lebih lambat. Berdasarkan penyebab perbedaan tersebut diduga akan mengakibatkan ketimpangan di antar pulau (Rosmeli, 2014)

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar pulau merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam tahap pembangunan ekonomi suatu wilayah. Terdapat banyaknya kendala yang pasti dihadapi disuatu negara termasuk negara Indonesia. Ketimpangan wilayah terjadi akibat ketidak merataan pemerataan dalam pembangunan ekonomi. Menurut Sjafrizal, (2012) dalam Islami *et al*, (2018) terdapat faktor yang dapat mengakibatkan ketimpangan antar pulau diantaranya perbedaan baik dari sisi sumber daya alam, situasi tenaga kerja, maupun alokasi dana pembangunan yang diberikan pemerintah untuk wilayah baik dari segi investasi pemerintah ataupun investasi swasta, kemudian adanya mobilitas barang dan jasa. Investasi adalah suatu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu pulau. Investasi baik yang berupa penanaman modal asing maupun penanaman modal yang terdapat di dalam negeri juga akan memberikan pada dampak terhadap ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia. Apabila terjadi investasi yang dilakukan lebih banyak di fokuskan kepada suatu daerah tertentu pada umumnya, maka mengakibatkan terjadinya aktivitas ekonomi disuatu daerah tersebut menjadikan lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memiliki investasi lebih kecil. Dari penyebab yang ada di Indonesia, tidak mengherankan apabila terjadi pada setiap wilayah biasanya terdapat wilayah maju dan berkembang.

Adapun faktor yang mendukung laju perubahan ketimpangan di indonesia, diantaranya perbedaan infrastruktur antar pulau. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan disuatu wilayah. Hal ini karena telah menuntut ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, hubungan perkembangan infrastruktur dalam pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastuktur yang terjadi juga akan berperan terhadap kesejahteraan pembangunan ekonomi yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan antar pulau (Sukwika, 2018).

Indonesia sebagai negara berkembang, pemerintah perlu mempunyai peran penting untuk mempercepat suatu pertumbuhan ekonomi di negaranya. Langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan ekonomi perlu dilaksanakan oleh suatu pemerintahan pada pendapatan dan pengeluaran guna mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan keselarasan ekonomi pada umumnya. Komposisi anggaran pemerintah dan perubahan tingkat, baik dari segi pajak ataupun pengeluaran dari pemerintah itu sendiri, dapat mempengaruhi adanya variabel permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi, pola distribusi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari adanya kebijakan fiskal yang merupakan tindakan pemerintah untuk mengatur adanya jalan perekonomian dengan menetapkan jumlah pendapatan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Untuk menstabilkan harga, tingkat output, kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan kebijakan fiskal (Anitasari *et al*, 2015). Berikut anggaran pengeluaran pemerintah antar pulau Indonesia tahun 2017 -2020.

Tabel 1.

Anggaran Pengeluaran Pemerintah antar Pulau Indonesia tahun 2017 -2020.

PULAU	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Sumatera	72.926	75.294	81.366	78.854	77.11
Jawa	187.272	200.239	204.983	225.688	204.5455
Nusa Tenggara	10.409	10.394	10.863	11.987	10.91325
Kalimantan	27.328	31.616	35.817	31.348	31.52725
Sulawesi	24.661	25.566	27.41	27.977	26.4035
Maluku	5.157	5.599	5.945	6.74	5.86025
Papua	21.855	22.232	29.669	24.569	24.58125

Tabel 1 menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah yang terjadi di antar pulau di Indonesia pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif dan cenderung terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Perbedaan pengeluara tersebut akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan antar wilayah dan dapat memicu ketimpangan wantar wilayah. Pengeluaran pemerintah yang semakin besar akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah atau daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian melalui program atau kegiatan yang bertujuan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada pada wilayah dan daerah tersebut, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di suatu daerah (Dhyatmika et al, 2013).

Dengan demikian hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah yang terjadi di antar pulau di Indonesia pada tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif dan cenderung terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Perbedaan pengeluara tersebut akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan antar wilayah dan dapat memicu ketimpangan wantar wilayah. Keterbaharuan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi indeks williamson berdasrkan kepulauan di Indonesia yang belum pernah dilakukan dilakukan di Indonesia. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah 1) mengidentifikasi indeks williamson berdasrkan kepulauan di Indonesia tahun 2016-2020; 2) menganalisis hubungan ketimpangan pembangunan terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan investasi antar pulau di indonesia tahun 2016-2020.

METODE

Penelitian ini dilakukan antar pulau di Indonesia. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang berbentuk *time series*. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan deskriptif. Untuk menentukan ketimpangan pembangunan maka menggunakan rumus indeks williamson. Berikut rumus indeks williamson menurut (Rosmeli et al, 2014).

$$Wi = \frac{\sqrt{\sum (Yi - Y)^2 Fi/n}}{Y}$$

Dimana : Wi = nilai / indeks ketimpangan pulau; Yi = pendapatan perkapita masing-masing pulau; Y = total pendapatan per kapita; Fi = jumlah penduduk masing-masing pulau; n = jumlah penduduk indonesia. Berikut kriteria indeks williomson menurut (Yoda et al, 2019):

Tabel 2.

Kriteria Indeks Williamson	
Indeks Williamson	
0,00 – 0,25	Sangat Merata
0,26 – 0,50	Mendekati Merata
0,51 – 0,75	Tinggi
0,76 – 1,00	Sangat Tinggi

Analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan investasi yaitu analisis korelasi paerson dengan model sebagai berikut (Rosmeli et al, 2014):

Uji korelasi pearson ketimpangan pembangunan terhadap kesempatan kerja.

$$r = \frac{(n \sum kk y) - (\sum kk)(\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum kk^2 - (\sum kk)^2} \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Uji korelasi pearson ketimpangan pembangunan terhadap kemiskinan.

$$r = \frac{(n \sum k y) - (\sum k)(\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum k^2 - (\sum k)^2} \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Uji korelasi pearson ketimpangan pembangunan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

$$r = \frac{(n \sum ipm y) - (\sum ipm)(\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum ipm^2 - (\sum ipm)^2} \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Uji korelasi pearson ketimpangan pembangunan terhadap investasi.

$$r = \frac{(n \sum i y) - (\sum i)(\sum y)}{\sqrt{n \cdot \sum i^2 - (\sum i)^2} \sqrt{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Dimana: r = koefisien korelasi pearson; y = ketimpangan pembangunan ekonomi; kk = kesempatan kerja; k = kemiskinan; ipm = indeks pembangunan manusia; dan I = investasi. Agar dapat mengelompokkan korelasi pearson menggunakan kriteria dari Bertan et al (2016) sebagai berikut.

Tabel 3.

Interpretasi Koefisien Korelasi	
Korelasi Pearson	
0.800 - 1.000	Sangat Tinggi
0.600 - 0.800	Kuat
0.400 - 0.600	Cukup
0.200 - 0.400	Rendah
0.000 - 0.100	Sangat Rendah

Uji signifikansi untuk menguji objektivitas nilai Korelasi pearson yang diperoleh dilakukan dengan rumus (Arianto et al, 2020):

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan: t_{hitung} = nilai t; r = nilai koefisien korelasi; n = jumlah sampel. Untuk menginterpretasikan tingkat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, penulis mengacu pada pendapat (Alaslan, (2020); Putri, (2017); Sistara, (2021)) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Jika t hitung > t tabel berarti signifikan dan jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti tidak signifikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan antara Pulau di Indonesia.

Tabel 4.

Indeks Williamson antar pulau di Indonesia tahun 2016 - 2020.						
Pulau	Indeks Williamson					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Sumatera	0.78	0.76	0.75	0.75	0.73	0.75
Jawa	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Nusa Tenggara	0.49	0.51	0.54	0.54	0.50	0.52
Kalimantan	0.83	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Sulawesi	0.50	0.49	0.49	0.48	0.48	0.49
Maluku	0.26	0.27	0.27	0.27	0.30	0.28
Papua	0.66	0.66	0.65	0.70	0.69	0.67

Nilai indeks williamson Pulau Sumatera sebesar 0,75 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,51 sampai dengan 0,75 tersebut tergolong dalam kriteria tinggi. Menurut Umiyati, (2014) ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi ketimpangan yang terjadi di provinsi dan kabupaten atau kota yang baru diantaranya adalah suatu kesenjangan struktural akibat adanya aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada beberapa sektor-sektor tertentu seperti sektor primer diantaranya pertanian tradisional, keterbatasan adanya sumber daya yang berimplikasi pada tingkat tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya suatu akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan maupun pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) serta jumlah dan kualitas

infrastruktur yang memburuk dikarenakan tidaknya ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan tersebut.

Nilai indeks williamson di Pulau Jawa sebesar 1,00 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,76 sampai dengan 1,00 tersebut tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Menurut Rosmelia *et al*, (2014) tingkat ketimpangan yang tinggi ini tidak terlepas dari adanya banyak kota-kota besar yang memang memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi tidak terkecuali Pulau Jawa. Selain hal berikut ketimpangan yang tinggi juga disebabkan oleh adanya perbedaan infrastruktur yang ada di setiap masing-masing pulau di Indonesia. Perbedaan infrastruktur ini akan memberikan dampak pada aktifitas ekonomi yang di jalankan disetiap daerah tersebut. Menurut Gunawan, (2022) Provinsi DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, oleh karena itu pembangunan infrastruktur kereta api (MRT) berbasis TOD yang memaksimalkan pemanfaatan ruang bawah tanah (RBT) merupakan salah satu keharusan untuk meningkatkan fasilitas umum dan transportasi di daerah perkotaan tersebut. Menurut Fazli, (2019) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan jalan tol terpadu (MRT) hanya cocok dibangun di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta. Jalan raya terpadu (MRT) hanya cocok jika penduduknya 10 juta seperti Jakarta. Kalau MRT dibangun di provinsi berpenduduk satu juta saja, nanti bisa kosong dua juta. Karena itu, pemerintah belum berencana membangun MRT di daerah lain. Sehingga ketimpangan pembangunan menjadi salah satu permasalahan di pulau Jawa.

Nilai indeks williamson Pulau Nusa Tenggara sebesar 0,52 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,51 sampai dengan 0,75 tersebut tergolong dalam kriteria tinggi. Salah satu hal yang mendasari terjadinya ketimpangan di Pulau Nusa Tenggara adalah infrastruktur jalan. Menurut Kompas.com, (2020) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat jalan provinsi yang rusak di kawasan itu sepanjang 906 kilometer. Ada ratusan kilometer jalan provinsi ini tersebar di 21 kabupaten dan satu kota di wilayah yang memang berbatasan dengan Timor Leste. Berbeda dengan Provinsi Bali menurut Wadana *et al*, (2021) Infrastruktur jalan di Provinsi Bali berdasarkan panjang jalan yang berstatus jalan provinsi sudah mengalami peningkatan sebelumnya yaitu dari tahun 2017 yang menunjukkan angka 1372,73 km menjadi 9835,65 km pada tahun 2018. Peningkatan 8462,92 km disebabkan karena disitu jalan merupakan salah satu sarana dan prasarana penting penunjang pembangunan antar wilayah. Kemudahan yang ditimbulkan dengan tersedianya jalan tersebut akan otomatis berdampak positif bagi kelangsungan transaksi ekonomi antar daerah atau kota di Provinsi Bali tersebut. Sistem jalan yang berkategori baik memberikan suatu negara atau wilayah keunggulan kompetitif, memungkinkannya bersaing dalam adanya pemasaran produk, pengembangan industri, serta distribusi penduduk dan juga pertumbuhan pendapatan. Terbatasnya jaringan jalan akan menghambat dampak pada pertumbuhan wilayah sehingga mengganggu kegiatan ekonomi dan juga menyebabkan harga komoditas menjadi lebih tinggi atau meningkat. Oleh karena itu, perbedaan sementara infrastruktur jalan akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar provinsi.

Nilai indeks williamson Pulau Kalimantan sebesar 0,82 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,76 sampai dengan 1,00 tersebut tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Menurut Firman, (2021) penyebab ketimpangan di Pulau Kalimantan adalah pertambangan yang lebih besar namun tidak merata di suatu Kabupaten /Kota. Selain itu juga terdapat beberapa perbedaan sumber daya alam di Pulau Kalimantan antar Kabupaten /Kota, sehingga sebagian besar PDRB bertumpu pada sektor pertambangan itu sendiri. Penggalan dan keberadaan sumber daya alam yang ada, khususnya berada di sektor pertambangan, telah mengalami adanya tingkat produktivitas yang cukup tinggi yang juga meningkatkan pendapatan per kapita daerah tersebut. Menurut Sina *et al*, (2018) Kalimantan Timur memang sudah mengalami perubahan dari sistem kebijakan pemerintah di Indonesia dalam bidang infrastuktur, salah satunya adalah pembangunan jembatan Pulau Belang yang merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi). Begitu pula kota Balikpapan yang segera bertransformasi menjadi suatu kota metropolitan karena di kota tersebut memiliki pembangunan infrastruktur yang telah dibangun sesuai dengan apa yang diinginkan atau kebutuhan dalam upaya pembangunan wilayah dan ekonomi saat ini. Tidak hanya sampai disitu saja, di Balikpapan dan juga Samarinda menjadi salah satu kota incaran investor, dimana dengan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur tersebut, para investor ini sudah mulai bersaing untuk terus memajukan pertumbuhan ekonomi yang sudah ada di Kalimantan Timur tersebut.

Nilai indeks williamson Pulau Sulawesi sebesar 0,49 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,26 sampai dengan 0,50 tersebut tergolong dalam kriteria mendekati merata. Menurut Iskandar *et al*, (2018) Pulau Sulawesi memiliki tingkat disparitas antar wilayah yang lebih besar karena kontribusi atau

situasi ketimpangan yang terjadi secara internal ke kabupaten/kota lebih besar dibandingkan dengan ketimpangan di dalam provinsi. Menurut Amruddin, (2020) salah satu hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah di Pulau Sumatera khususnya di Provinsi Sulawesi Barat adalah pembangunan sumber daya manusia dan bidang kesehatan. Masalah kekurangan tenaga kesehatan di provinsi ini tentu berdampak besar pada sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan membantu mengatasi ketimpangan pembangunan antar kabupaten di Sulawesi. Menurut BPS, (2021) jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi lebih banyak dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan terdapat 34.474 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter (4.126), perawat (16370), bidan (10749), apoteker (2135), dan ahli gizi (1094). Perbedaan jumlah tenaga kesehatan diakibatkan karena minimnya jumlah tingkat pendidikan sarjana S1 maupun S2 dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu perbedaan jumlah tenaga kesehatan antar provinsi mengakibatkan ketimpangan pembangunan.

Nilai indeks williamson Pulau Maluku sebesar 0,28 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,26 sampai dengan 0,50 tersebut tergolong dalam kriteria mendekati merata. Menurut Ambar *et al*, (2021) masalah terpusatnya Aglomerasi di Kota Ternate juga menjadi salah satu pemicu atau penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi, alasannya adalah karena yang sudah mempunyai konsentrasi ekonomi yang cukup tinggi akan menjadi cenderung bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang memang sudah mempunyai konsentrasi lebih rendah. Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu potensi Pertambangan Nikel pada kenyataan menunjukkan bahwa terjadinya penyerapan tenaga kerja yang terserap dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, sudah tentu terjadi aktivitas migrasi penduduk besar-besaran akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat. Aktivitas pertambangan di kabupaten ini memberikan banyak dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah didaerah tersebut sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut juga mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik, (2016) Di Maluku, industri manufaktur hanya menyumbang 5,44 persen. Meski demikian, pemerintah terus berupaya mengembangkan industri manufaktur di Maluku dengan membangun kawasan industri di Buli (Maluku Utara).

Nilai indeks williamson Pulau Papua sebesar 0,67 persen. Menurut Yoda *et al*, (2019) nilai 0,51 sampai dengan 0,75 tersebut tergolong dalam kriteria tinggi. Meskipun ketersediaan infrastruktur pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus, namun pola persebarannya belum merata. Masih terdapat pula provinsi-provinsi yang persentase kecamatan yang terdapat SMA/MA/SMKnya masih tergolong rendah (dibawah 50%) yaitu di Papua Barat (45,41%) dan Papua (28,13%). Sementara itu provinsi yang sudah memiliki infrastuktur pendidikan bagus di setiap kecamatannya antara lain Provinsi Riau, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung (BPS, 2020). Infrastruktur pendidikan kurang baik di Papua Barat dan Papua di sebabkan karena pendidikan pada umumnya hanya padat dinikmati oleh masyarakat asli yang memang tinggal di perkotaan dan sekitarnya. Sementara mereka yang saat ini berada di kampung atau tempat tinggalnya di pedalaman yang sangat sulit diakses dari pusat ibu kota belum memperoleh layanan pendidikan yang maksimal atau layak seperti sekolah yang berada dikota.

Hubungan Ketimpangan Pembangunan terhadap Kesempatan Kerja antar Pulau di Indonesia

Tabel 5.

Korelasi person ketimpangan pembangunan terhadap kesempatan kerja.

Pulau	Korelasi Person	t _{-hitung}	t _{-tabel}
Sumatera	0,9997	302,9655	2,0085
Jawa	0,9999	655,6946	2,0422
Nusa Tenggara	0,9990	83,3391	2,1314
Kalimantan	0,9999	806,9406	2,0595
Sulawesi	0,9999	457,7179	2,0422
Maluku	0,9980	44,7736	2,2281
Papua	0,9991	70,4546	2,2281

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia secara keseluruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap kesempatan kerja antar pulau di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika ketimpangan pembangunan meningkat maka akan meningkatkan kesempatan kerja antar pulau di Indonesia. Ketimpangan pembangunan memiliki

hubungan yang sangat kuat terhadap kesempatan kerja, karena ketimpangan pembangunan merupakan suatu distribusi yang tidak merata (ketidakadilan dan ketidaksetaraan) yang dialami oleh setiap berbagai individu dan kelompok yang sudah dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian tidak sama serta pengecualian yang berdasarkan posisi sosial dan juga gaya hidup tersebut. Namun hak dan kewajiban tidak didistribusikan secara merata atau bisa disebut ketidaksetaraan akses untuk memperoleh atau memanfaatkan sumber daya yang sudah ada atau yang sudah tersedia. Sumber daya bisa juga berupa kebutuhan primer, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Dapat pula berupa kebutuhan sekunder, misalnya seperti sarana pembangunan usaha, krmudian sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karier, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu jika hal ini tidak tersedia maka akan mempengaruhi kesempatan kerja di Indonesia (Najoan *et al*, 2017).

Kesempatan kerja tertinggi di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk lebih sedikit di bandingkan dengan jumlah penduduk di Pulau Jawa (BPS, 2021). Namun, karena pembangunan di Indonesia berkonsentrasi di Pulau Jawa, maka menyebabkan beban di Pulau Jawa dalam menyediakan kesempatan kerja untuk penduduknya yang semakin besar. Migrasi penduduk dari berbagai wilayah atau pulau yang ada di Indonesia untuk mencari kehidupan ke daerah-daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa menjadi pilihan seseorang untuk mencari pekerjaan (Ekwarso, 2014). Salah satu penyebab permasalahan pembangunan di suatu wilayah di Indonesia dalam hal ini adalah pengangguran. Pengangguran ini muncul karena adanya jumlah lapangan kerja yang tersedia kurang atau lebih kecil dari pada jumlah pencari kerja. Itu artinya hanya ada sedikit lapangan kerja yang tidak mampu menampung banyaknya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Bahwa salah satu tujuan adanya pembangunan nasional adalah untuk berupaya memperluas kesempatan kerja yang ada bagi masyarakat sekitar, artinya pengangguran merupakan salah satu tugas besar bagi pemerintah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Setiap pembangunan yang tersedia harus diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja, sehingga disetiap warga negaranya dapat mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang sangat layak (Purnomo, 2021).

Hubungan Ketimpangan Pembangunan terhadap Kemiskinan antar Pulau di Indonesia

Tabel 6.
Korelasi Person dan Signifikansi Ketimpangan Pembangunan terhadap Kemiskinan

Pulau	Korelasi Person	t-hitung	t-tabel
Sumatera	0,9997	295,8641	2,0085
Jawa	0,9977	79,2205	2,0422
Nusa Tenggara	0,9965	43,6126	2,1314
Kalimantan	0,9997	230,2939	2,0595
Sulawesi	0,9994	167,3340	2,0422
Maluku	0,9969	36,2241	2,2281
Papua	0,9962	32,7885	2,2281

Hasil analisis korelasi person menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia secara keseluruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap kemiskinan antar pulau di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan jika ketimpangan pembangunan meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan antar pulau di Indonesia. Kemiskinan sebenarnya lahir sebagai ada dampak dari proses di suatu pembangunan yang mungkin atau tidak mencapai target perbaikan sosial. Faktor utama adanya kemiskinan tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan, sumber daya alam tidak ada, dan modal terbatas. Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan seseorang kurang memiliki keterampilan yang dimiliki, serta pengetahuan yang memadai. Begitu juga dengan kurangnya sumber daya alam, saat sumberdaya alam tidak ada atau tidak dapat diolah, maka hal ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya kemiskinan di Indonesia dan jika modal terbatas maka bisa menjadi penghambat seseorang untuk berkembang. Dari penyebab kemiskinan akan berdampak pada masyarakat seperti, banyaknya pengangguran, kriminalitas dimana-mana, buruknya gizi akan berdampak pada kesehatan manusia, dan buruknya generasi penerus akibat banyaknya faktor seperti putus sekolah (Itang, 2017). Menurut BPS, (2021) kemiskinan tertinggi terdapat pada Pulau Sumatera, sementara pulau yang mengalami tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Pulau Maluku.

Hubungan Ketimpangan Pembangunan terhadap IPM antar Pulau di Indonesia

Tabel 7.

Korelasi Person dan Signifikansi Ketimpangan Pembangunan terhadap IPM

Pulau	Korelasi Person	t _{hitung}	t _{tabel}
Sumatera	0,9995	219,1415	2,0085
Jawa	0,9999	921,1754	2,0422
Nusa Tenggara	0,9991	89,3567	2,1314
Kalimantan	0,9998	319,5230	2,0595
Sulawesi	0,9997	221,1530	2,0422
Maluku	0,9986	54,3663	2,2281
Papua	0,9995	96,0270	2,2281

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia secara keseluruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar pulau di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan ketimpangan pembangunan terdapat hubungan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar pulau di Indonesia. Artinya jika ketimpangan pembangunan meningkat maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar pulau di Indonesia.

ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap indeks pembangunan manusia (IPM), karena ketimpangan merupakan sarana dan prasarana penyebab salah satu terjadinya kendala sulitnya kemajuan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Dengan keadaan yang terbatas atau mungkin bahkan kekurangan, para siswa khususnya pada daerah pedesaan tidak dapat merasakan fasilitas sebaik sekolah di perkotaan. misalnya seperti, ruang belajar yang memadai dan nyaman, meja kursi yang bagus, fasilitas internet baik, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, serta sarana olahraga seperti alat atau tempat olahraga yang tersedia dan lainlain. Padahal dengan adanya sarana dan prasarana menjadikan bagian ini sangatlah penting dari standar pendidikan yang ada. Sarana pendidikan adalah suatu media atau alat material yang sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung seperti perabot (kursi dan meja), peralatan pendidikan (alat peraga), dan media pendidikan (papan tulis). Sementara itu, prasarana pendidikan sangat berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar seperti ruang kelas, dan perpustakaan yang pastinya tidak kalah pentingnya bagi proses pendidikan. Jika hal ini tersedia di seluruh pulau di Indonesia maka akan meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia (Syaharani et al, 2019)

Rakyat Indonesia saat ini sedang mengalami permasalahan ketimpangan atau ketidakmerataan dalam upaya pembangunan manusia yang telah diukur oleh indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia sangat mencerminkan dari sisi kualitas modal pada manusia yang sudah diukur dari adanya indikator tingkat lama sekolah, kesehatan, dan daya beli manusia (Ezkirianto et al, 2013). Menurut BPS, (2021) tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) tertinggi terdapat pada Pulau Sumatera karena di Pulau Sumatera sendiri memiliki sumber daya alam yang amat sangat berlimpah. Sementara tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) terendah terdapat pada pulau kalimantan. Menurut (Arifin et al, 2017) perkembangan kemiskinan di Pulau Kalimantan dapat berakibat menghambat individu untuk mengkonsumsi nutrisi yang bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak adalah harapan semua manusia untuk menunjang hidup yang sehat dan akan menghasilkan sumber daya manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai seberapa besar kualitas pembaangunan manusia di wilayah tertentu, baik dari segi dampak terhadap situasi atau kondisi fisik manusia tersebut (kesehatan dan kesejahteraan masyarakat) ataupun kondisi bukan yang berupa fisik (pendidikan). Pembangunan manusia yang dapat berdampak pada kondisi fisik masyarakat tertentu contohnya jumlah dari angka harapan hidup manusia dan daya beli masyarakat tersebut, sedangkan dampak bukan fisik dapat dilihat dari seberapa besar kualitas pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat pada umunya (Melliana et al, 2013).

Nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan adanya seberapa jauh daerah tersebut telah menumpuh atau mencapai target yang telah ditentukan yakni angka harapan hidup sebesar 85 tahun, tingkat pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat (tampa batasan atau tanpa kecuali), serta tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai taraf hidup layak. Semakin mendekati nilai

indeks pembangunan manusia disuatu daerah, maka akan semakin dekat pula jalan yang harus ditempuh agar dapat mencapai tujuan tersebut (Nuriyah et al, 2017).

Hubungan Ketimpangan Pembangunan terhadap Investasi antar Pulau di Indonesia

Tabel 8.
Korelasi Person dan Signifikansi Ketimpangan Pembangunan terhadap Investasi

Pulau	Korelasi Person	t-hitung	t-tabel
Sumatera	0,9244	18,1706	2,0085
Jawa	0,9860	31,7353	2,0422
Nusa Tenggara	0,9002	8,2796	2,1314
Kalimantan	0,9706	19,9345	2,0595
Sulawesi	0,9593	18,7570	2,0422
Maluku	0,8304	5,0766	2,2281
Papua	0,8310	5,0847	2,2281

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia secara keseluruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap Investasi antar pulau di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan jika ketimpangan pembangunan ditingkatkan maka akan meningkatkan investasi antar pulau di Indonesia. Ketimpangan pembangunan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap investasi, karena ketimpangan merupakan penyebab terjadinya keadaan dikarenakan adanya sebuah kesenjangan atau ketidak seimbangan akses untuk berupaya mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada atau yang tersedia. Sumberdaya tersebut mencakup kebutuhan primer, seperti peluang usaha, kebutubahn tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kerja. Selain kebutuhan primer ada pula kebutuhan sekunder, diantaranya kebutuhan sarana untuk mengembangkan usaha dan karir seseorang. Jika hal ini tersedia di suatu pulau maka akan meningkatkan investasi di Indonesia (Abdain, 2014).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian masing-masing di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan 1) Pulau Sumatera, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua masuk kategori dengan ketimpangan tinggi. Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan masuk kategori ketimpangan sangat tinggi. Pulau Sulawesi masuk kategori ketimpangan mendekati merata. Pulau Maluku masuk dalam kategori sangat merata. 2) Ketimpangan pembangunan antar pulau di Indonesia secara keseluruhan memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan terhadap kesempatan kerja, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan investasu antar pulau di Indonesia. Temuan ini mengimplikasikan diharapkan pemerintah dapat melakukam pembangunan wilayah yang merata di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan desentralisasi fiskal yan merata disemua wilayah serta meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dalam negeri maupun luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, A. (2014). Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Muamalah*, 4(2), 15-26. <https://doi.org/10.24256/M.V4i2.656>
- Alaslan, A. (2021). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBisPower* 1(1), 97-111.
- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1). 1-12.
- Amruddin, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Di Sulawesi Barat. *Jurnal Arajang*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.31605/Arajang.V3i1.582>
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). 117-127. <https://doi.org/10.37676/Ekombis.V3i2.139>.
- Arianto, Z. G., & Syah, N. (2020). Hubungan Pengetahuan K3 Dengan Hasil Praktikum Mahasiswa Di Workshop Konstruksi Teknik Sipil Ft Unp. *Jurnal Applied Science In Civil Engineering*, 1(2), 100-105.

- Arifin, B., & Murjani, A. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 7(2), 1352-1368.
- Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295. [Http://Dx.Doi.Org/10.23887/Jiah.V9i3.22539](http://Dx.Doi.Org/10.23887/Jiah.V9i3.22539)
- Aurdin, Y. (2018). Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Daerah Rawan Genangan di Sepanjang Sistem Drainase Eksisting Kota Palembang (Studi Kasus Pembangunan Light Rail Transit Kota Palembang). *Proceeding of The URECOL*, 84-95.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, (2021). *Indonesia Dalam Angka 2021*. Indonesia : Badan Pusat Statistik.
- Bertan, C. V., Dundu, A. K. T., & Mandagi, R. J. (2016). Pengaruh Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (Tenaga Kerja) Terhadap Hasil Pekerjaan (Studi Kasus Perumahan Taman Mapanget Raya (Tamara)). *Jurnal Sipil Statik*, 4(1), 13-20.
- Dhyatmika, K. W., & Atmanti, H. D. (2013). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ekwarso, H. (2014). Analisis Angkatan Kerja Antar Pulau Di Indonesia Tahun 2012-2013. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 4(11), 174-193.
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2013). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pdrb Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14-29. [Https://Doi.Org/10.29244/Jekp.2.1.2013.14-29](https://Doi.Org/10.29244/Jekp.2.1.2013.14-29)
- Fazli.Z.A. (2019). Pemerintah Belum Rencana MRT Di Daerah Lain. <https://www.medcom.id/nasional/metro/zNALWR3K-pemerintah-belum-rancang-mrt-di-daerah-lain>
- Firman, F. (2021). Indikator Fundamental Ekonomi Pulau Kalimantan: Analisis Tipologi Daerah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(2), 104-113. [Https://Doi.Org/10.47065/Ekuitas.V3i2.1087](https://Doi.Org/10.47065/Ekuitas.V3i2.1087)
- Gunawan, I. (2022). Kajian Model Bisnis Untuk Pengelolaan Kawasan Stasiun MRT Jakarta Beserta Aturan Hukum Pemanfaatan Ruang Yang Diperlukan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(01), 76-92.
- Hidayati, A. N. (2017). Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242. [Https://Doi.Org/10.35891/MI.V8i2.598](https://Doi.Org/10.35891/MI.V8i2.598)
- Idris, K., Syaparuddin, S., & Hodijah, S. (2014). Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(1). [Https://Doi.Org/10.22437/Paradigma.V9i1.2311](https://Doi.Org/10.22437/Paradigma.V9i1.2311)
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2018). Analisis Kondisi Kesenjangan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan (Analysis of Economic Disparity Condition: Case Study From Regency/City of South Sulawesi Indonesia). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 37-52.
- Islami, F. S., & Nugroho, S. B. M. (2018). Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1). 29-39. [Http://Dx.Doi.Org/10.24856/Mem.V33i1.564](http://Dx.Doi.Org/10.24856/Mem.V33i1.564)
- Itang, I. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1-30.
- Kompas.Com. (2020). Jalan Provinsi Sepanjang 906 Kilometer Di NTT Dalam Kondisi Rusak. <https://amp.kompas.com/properti/read/2020/09/02/101556021/jalan-provinsi-sepanjang-906-kilometer-di-ntt-dalam-kondisi-rusak>

- Kompas.Com. (2021) Medan Bakal Punya LRT, Ini Bocoran Dari Menhub. <https://money.kompas.com/read/2021/05/30/114351626/medan-bakal-punya-lrt-ini-bocoran-dari-menhub>
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 2(2), D237-D242. 10.12962/J23373520.V2i2.4844
- Najoan, B., Kawengian, D. D., & Harilama, S. H. (2017). Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial Di Kelurahan Mampang Kota Depok Jawa Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(3).1-11.
- Nikita, L. A., Masinambow, V. A., & Tolosang, K. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Perkapita (Global) Terhadap Jumlah Wisatawan Asing Dan Pdrb Sektor Pariwisata Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02), 13-24.
- Niswati, K. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2011. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 9(1). 82-89. <https://doi.org/10.20884/1.Erjpe.2014.9.1.480>
- Nuriyah, S. R. A., & Muafiqie, H. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. *Journal Of Public Power*, 1(2), 97-109.
- Purnomo, S. D. (2021). Analysis of Labor Absorption in Central Java Province. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 240-244. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.311>
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 11-18. <https://doi.org/10.17509/jpak.v5i1.15384>
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2014). Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 3(1), 456-463. <https://doi.org/10.22437/Jmk.V3i1.1861>
- Sina, A. I., & Farida, L. E. (2018, December). Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur. In *Proceeding of National Conference on Asbis*, 3, 34-42.
- Sistara, M. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 84-94.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Syahrani, A. N., & Nurani, F. (2019). Kesenjangan Mutu Pendidikan Antara Desa Dan Kota.1-6. Universitas Brawijaya.
- Umiyati.E. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2). 42-50. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v9i2.2207>
- Wadana, R. K., & Prijanto, W. J. (2021). Analisis Pengaruh Infrastruktur, Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali 2015-2020. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6), 875-885. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i6.303>
- Yoda, T. C., & Febriani, R. (2020). Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Antarkota Di Sumatera Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(4), 369-375.